

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR
Jl. Dr. Muwardi No. 395 Telp (0263) 263424 Cianjur 43215 Jawa Barat

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Karunia - Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Akan tetapi masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itulah, diperlukan kebijakan - kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur.

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan dan isu strategis di masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir.

“Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan perhubungan”

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2020 kami buat, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi dalam pengambilan kebijakan / keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan di sektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun - tahun mendatang. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan.

Cianjur, 16 Februari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur



Drs. GECEP DICKY HARYADI
NIP. 19670220 198603 1 001

DAFTAR ISI

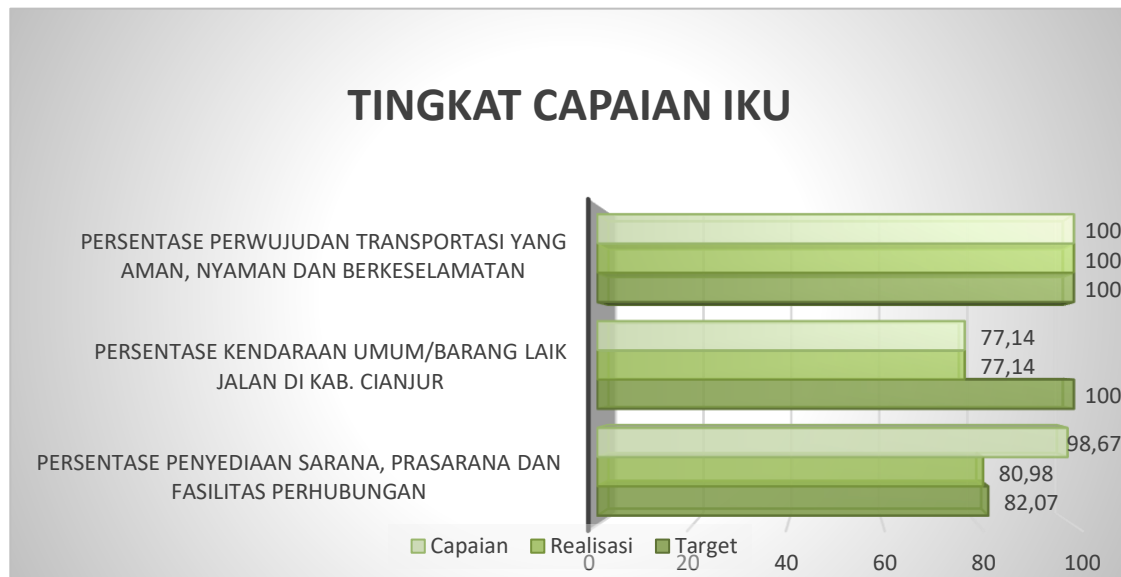
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Cianjur.....	2
4. Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	3
4.1 Penataan Organisasi	4
4.2 Prinsip dan Tata Laksana.....	4
4.3 Tata Kerja.....	5
4.4 Prosedur Kerja.....	5
4.5 Sumber Daya Dinas.....	8
5. Struktur Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....	11
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
3. Rencana Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
2. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	16
3. Capaian Indikator Kinerja (IKU)	17
4. Pengukuran Dan Analisis Kinerja	19
5. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran.....	24
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan.	33
B. Hambatan Dan Upaya.....	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TINGKAT PENCAPAIAN IKU

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU masuk ke dalam kategori **SANGAT TINGGI** di 2 Indikator dan kategori **TINGGI** di 1 Indikator. Dalam capaian tersebut terdapat 1 indikator kinerja yang telah mencapai Target namun masih ada 2 indikator yang belum mencapai Target. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan terminal dan ada nya penutupan dan pembatasan jam pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Pembatasan jam layanan tersebut sesuai dengan PERBUP Kab. Cianjur No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* oleh karena itu agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. *Good governance* yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi . Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Pertanggung jawaban tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Isu otonomi daerah merupakan isu yang sangat mempengaruhi Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan/Tataran Transportasi Lokal. Sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan diubah dengan UU No. 34 tahun 2004, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi didaerahnya masing-masing secara mandiri.

Di dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terletak di Jl. Dr. Muwardi No. 395 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 18 (Delapan belas) Dinas yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Cianjur yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur merupakan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai peraturan perundang-perundangan;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.4.1 Penataan Organisasi Dinas Perhubungan

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a) Kepala
 - b) Sekretariat membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Bidang Lalu Lintas membawahkan :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 3) Seksi Perlengkapan Jalan.
 - d) Bidang Angkutan membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Orang;
 - 2) Seksi Angkutan Khusus dan Barang;
 - e) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan membawahkan :
 - 1) Seksi Teknik Sarana;
 - 2) Seksi Teknik Keselamatan.
 - f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - 1) UPTD Terminal Rawabango;
 - 2) UPTD Terminal Pasir Hayam;
 - 3) UPTD Terminal Cipanas;
 - 4) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional : Penguji Kendaraan Bermotor

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikn tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- c) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas serta keselamatan lalu lintas;
- d) Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang;
- e) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan;

1.4.2 Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

1.4.3 Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.4.4 Prosedur Kerja Dinas:

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan megendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala dalam menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, dan perlengkapan jalan.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Seksi Pengendalian dan Operasional

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional.

Seksi Perlengkapan Jalan

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan bertanggungjawab membantu Kepala dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang, serta angkutan khusus dan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Angkutan Orang

Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan orang.

Seksi Angkutan Khusus dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis angkutan khusus dan barang.

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan bertanggungjawab membantu Kepala dalam melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan keselamatan.

Seksi Teknik Sarana

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis sarana.

Seksi Teknik Keselamatan

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas bertanggungjawab membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknik keselamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional, yaitu pengujian kendaraan bermotor.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 23 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b= 1 jabatan, Eselon III/a= 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 14 jabatan, dan Eselon IV/b =4 jabatan.

1.4.5 Sumber Daya Dinas

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2020 seluruhnya sebanyak 244 orang. Menurut jenjang pendidikan lebih dari 54,50% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 68% merupakan tenaga sukarela sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	TKS	Jumlah	%
1	Strata 2	6	1	7	2,98
2	Strata 1 / Diploma IV	41	26	67	28,51
3	Sarjana Muda / Diploma 3	2	1	3	1,28
4	Diploma 2	1	3	4	1,70
5	SLTA / Sederajat	14	113	127	54,04
6	SLTP / Sederajat	3	13	16	6,81
7	SD	1	10	11	4,68
J u m l a h		68	167	235	100

Tabel.2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2020

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil	68	28,94
2	Tenaga Kerja Sukarela	167	71,06
J u m l a h		235	100

Tabel 3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan Tahun 2020

No.	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	%
1	IV/c	1	1,47
2	IV/b	0	0
3	IV/a	4	5,88
4	III/d	12	17,65
5	III/c	19	27,94
6	III/b	10	14,71
7	III/a	5	7,35
8	II/d	2	2,94
9	II/c	4	5,88
10	II/b	9	13,24
11	II/a	1	1,47
12	I/d	1	1,47
J u m l a h		68	100

Sarana dan Prasarana Pelayanan

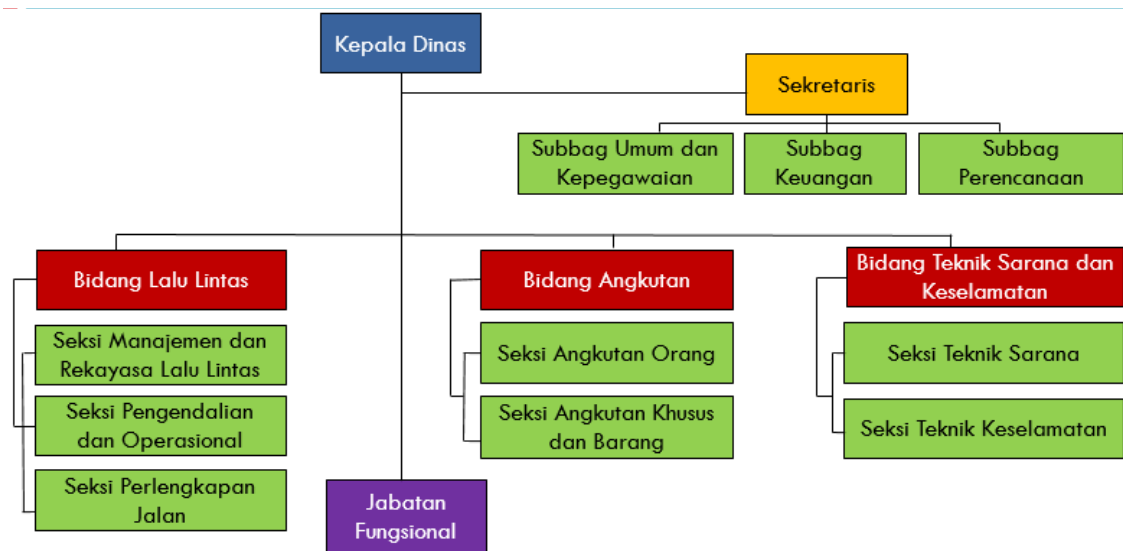
Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Asset Dinas Perhubungan Tahun 2020

	Saldo Akhir Tahun 2020	Saldo Awal Tahun 2020
ASET LANCAR		
Persediaan	662,633,199.66	774.916.755,37
Jumlah Aset Lancar	662,633,199.66	774.916.755,37
ASET TETAP		
Tanah	16,054,600,000.00	16.054.600.000,00
Peralatan dan Mesin	14,581,269,320.87	14.285.265.973,69
Gedung dan Bangunan	10,704,986,402.00	10.949.977.047,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,863,753,534.00	18.883.405.142,00
Aset Tetap Lainnya	2,322,000.00	2.322.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	178,935,000.00	139.423.000,00
Jumlah Aset Tetap	69,385,866,256.87	60.314.993.162,69
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	1,924,310,250.00	1.742.721.250,00
Aset Lain-lain	1,906,531,450.00	1.906.531.450,00
Jumlah Aset Lainnya	3,830,841,700.00	3.649.252.700,00
Jumlah Total Aset	73,879,341,156.53	64.739.162.618,06

1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan terdapat 4 (empat) UPTD yaitu :

- a) UPTD Terminal Rawabango;
- b) UPTD Terminal Pasir Hayam;
- c) UPTD Terminal Cipanas;
- d) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan

1.1. Visi dan Misi Kabupaten Cianjur

Visi, misi, dan program Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 adalah “**Cianjur Lebih maju dan agamis**”. Ditindaklanjuti dengan pernyataan tiga misi sebagai berikut: “ Dengan memperhatikan program Nawa Cita Pemerintah Pusat, *common goals* nya Pemerintah Provinsi serta amanat RPJPD Cianjur 2005-2025, merumuskan misi utama untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Pembangunan keagamaan;
3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dalam pencapaian misi Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan merupakan pendukung pencapaian pada misi ke -1 yaitu “Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan” dengan sasarannya adalah:

- (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup,
- (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Adapun sub programnya sebagai berikut:
 - a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan dan jembatan strategis;
 - b. Peningkatan sarana-prasarana irigasi dan elektrifikasi perdesaan;
 - c. Mitigasi bencana serta pengendalian banjir dan kekeringan;
 - d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih dan peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan;
 - e. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran ;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup;
 - g. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

1.2. Tujuan

Dalam mewujudkan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, perlu adanya tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi” guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten

khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta guna mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu *zero accident*.

1.3. Sasaran

Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat dengan membangun prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, serta fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, kerucut, marka dan PJU;
2. Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan darat dengan menambah kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5 Rencana Strategis Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Transportasi	1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat b. Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan darat	a. Mendukung kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang/jasa dalam kerangka pengembangan konektivitas intrawilayah maupun interwilayah b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	
	2. Meningkatnya Pelayanan Regulasi Bidang Perhubungan Darat	a. Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur b. Persentase perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan Berkeselamatan	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi	1. Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas; 2. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	

2. Perjanjian Kinerja TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolok ukur pembuatan LKjIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada **Tabel 6**.

TABEL 6

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan Darat	1.1	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	82,07 %
2.	Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan darat	2.1	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur	100%
		2.2	Persentase perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan	100 %

3. Rencana Anggaran Tahun 2020

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 4.151.950.500,00** Belanja Tidak Langsung Rp. **9.871.488.697,00** dan Belanja Langsung Rp. **11.142.350.434,00**.

Anggaran belanja langsung (tanpa non-urusan) per sasaran strategis dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Tabel 7 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Indikator Sasaran	
		5.911.983.041	100		
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat	3.590.769.041	60,73	1.1	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
2.	Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan darat	2.321.214.000	39,26	2.1	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kab. Cianjur
				2.2	Persentase perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan Berkeselamatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit - unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

2. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- **Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :**

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

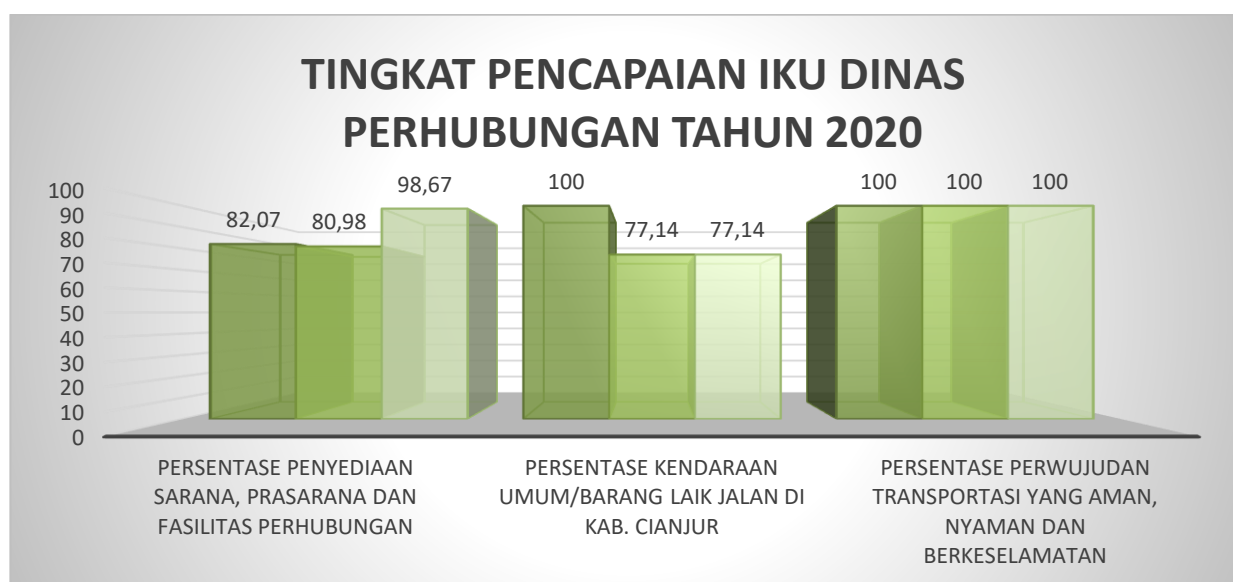
3. CAPAIAN KINERJA ATAS IKU

Capaian IKU tahun 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 9. Tabel Pencapaian IKU Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Capaian 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan Darat	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	82,07	80,98	98,67%
2.	Meningkatnya pelayanan bidang perhubungan darat	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kab. Cianjur	100	77,14	77,14%
		Persentase perwujudan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan	100	100	100%



Gambar 2. Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2020

Capaian IKU Tahun 2017 sampai Tahun 2020

	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Target 2021
1	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penyediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	15,38	39,04%	46,21%	70,92%	80,98%	100%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	100	94,59%	100,74%	97%	77,14%	100%
		Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan	100	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 10 Capaian Tahun 2017 sampai Tahun 2020

Jika dilihat dari tabel yang disajikan diatas pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan di 2 Indikator Kinerja namun pada Indikator Persentasi Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan Di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan, hal itu dikarenakan adanya penutupan dan pembatasan jam layanan sesuai dengan PERBUP Kab. Cianjur No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19).

4. Pengukuran dan Analisis Kinerja

Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Transportasi Untuk Mencapai Zero Accident.

Berdasarkan dokumen Renstra, Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Transportasi Untuk Mencapai Zero Accident, dan memiliki 2 sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Realisasi indikator kinerja sasaran 1 : Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah 80,98% dari target 82,07% atau dengan Capaian 98,67% atau masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan tidak adanya pembuatan marka, Terminal/shelter pada tahun ini.

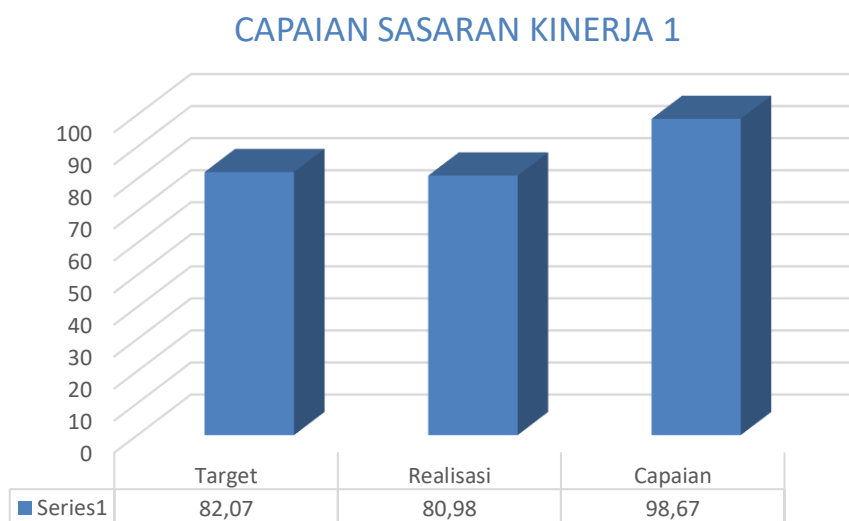
Adapun eksisting shelter yang ada adalah sebanyak 13 shelter/halte yang tersebar di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur.

Capaian Kinerja Sasaran 1 dapat dilihat pada **Tabel 11** dan **Gambar 3**.

Tabel 11. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Thn. 2020	Target Thn. 2020	Capaian Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	80,98 %	82,07 %	98,67%

Sumber: Hasil Pengolahan Data



Gambar 3. Trend Capaian Kinerja Sasaran 1

Permasalahan:

- (1) Fasilitas Terminal yang sangat minim dan dibawah standar pelayanan minimum.

Solusi

- (1) Menganggarkan anggaran untuk perbaikan fasilitas terminal.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat

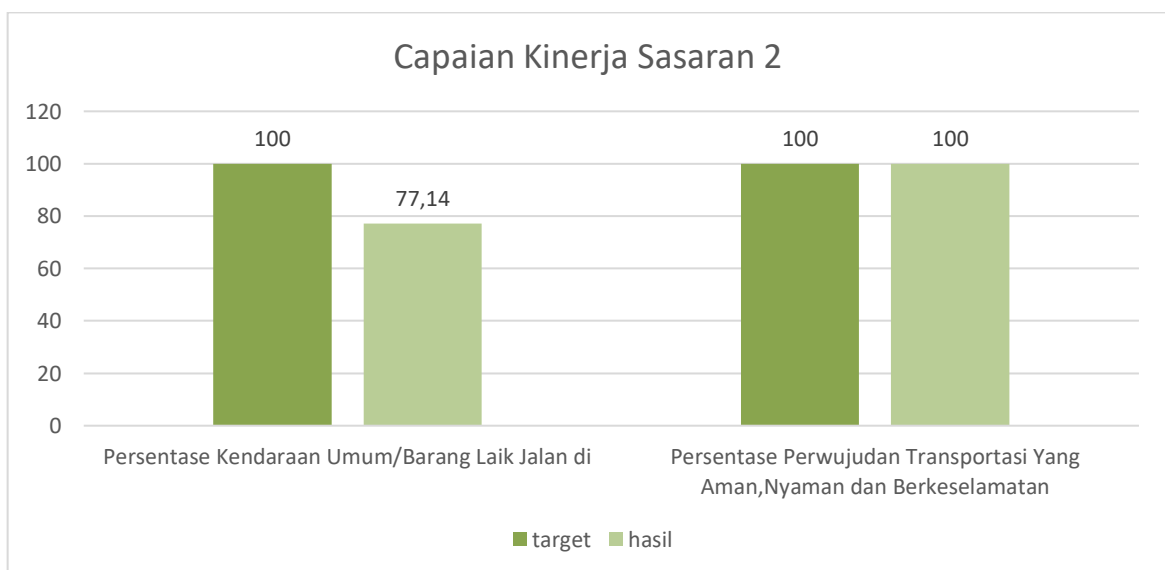
Sasaran 2 memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur dan Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman,Nyaman dan Berkeselamatan.

Capaian indikator 1 sebesar 77,14% dengan kategori **TINGGI** dan Capaian indikator 2 sebesar 100% dengan kategori **SANGAT TINGGI**.Capaian Kinerja sasaran 2 disajikan pada tabel 12 dan gambar 4 .

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2020	Target Th. 2020	Capaian Tahun 2020
1	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	77,14 %	100 %	77,17%
2	Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan	100 %	100 %	100 %

Sumber: Hasil pengolahan data



Gambar 4 Trend Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 Indikator 1

Capaian kinerja pada indikator 1 Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada **Tabel 13**.

Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Hasil Thn. 2020			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	100 %	77,14%	77,14%	100 %

Sumber: Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Pada Indikator Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur tercapai 77,14 % dari target 100 % atau pencapaian sebesar 77,14 % termasuk dalam kategori **TINGGI**. Pencapaian tersebut didapat dari presentasi jumlah kendaraan yang laik jalan dibagi dengan target kendaraan laik jalan di Kabupaten Cianjur. Target kendaraan yang di uji sebesar 21.081 kendaraan sedangkan kendaraan yang di uji laik jalan sebesar 16.262 kendaraan. Tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Parsial yang berimbas pada penutupan dan pembatasan jam Pelayanan. Pembatasan jam pelayanan ini sesuai dengan PERBUP Kab. Cianjur No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Permasalahan:

- (1) Kurangnya SDM fungsional penguji dikarenakan banyak pegawai yang pensiun.

Solusi:

- (1) Memberikan kesempatan diklat penguji untuk mengganti SDM penguji yang pensiun serta mengadakan formasi untuk PNS Fungsional penguji.

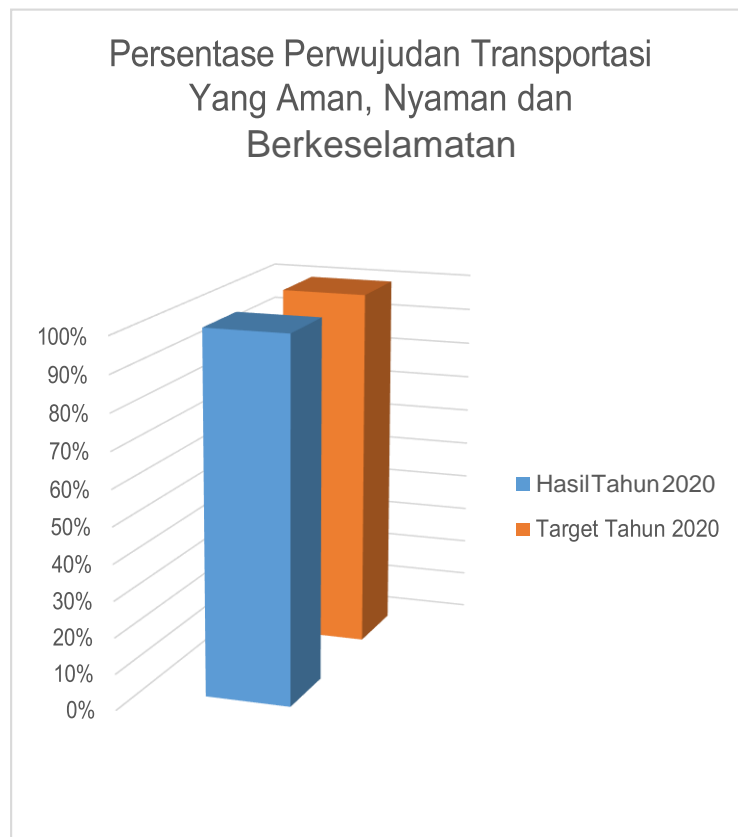
Sasaran 2 Indikator 2

Capaian kinerja pada indikator 2 Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan dapat dilihat pada **Tabel 14** dan **Gambar 5**.

Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Hasil Thn. 2020			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Bidang Lalulintas



Gambar 5 Target dan Realisasi Sasaran 2 Indikator 2

Pada Indikator Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan tercapai 100 % dari target 100 % atau pencapaian sebesar 100 % termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Pada indikator ini tercapai dikarenakan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang realisasinya 100% yaitu :

1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	Target Thn.2020	Realisasi Thn. 2020
1.1	Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100%	100%
1.2	Pengelolaan Angkutan	100%	100%
1.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran	100%	100%
1.4	Aksi Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%
1.5	Pengendalian Operasional	100%	100%

Tabel 15 Kegiatan-kegiatan pada Indikator Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan

5. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indikator dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur. APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 21.013.839.131,00

Terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.871.488.697,00 Dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.11.142.350.434,00.

Anggaran Belanja Langsung Urusan Wajib dan Non Urusan sebesar Rp.11.142.350.434,00 dan terrealisasi sebesar Rp.10.446.908.484,00 ,untuk realisasi kegiatan Non Urusan sebesar Rp.4.605.920.289,00 dari target Rp.5.230.367.393,00 Dan realisasi kegiatan urusan wajib sebesar Rp. 5.840.988.195,00 dari target Rp.5.911.983.041,00

Anggaran dan realisasi APBD Dinas Perhubungan tahun 2020 sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.151.950.500	3.630.774.000	87,45
Belanja Tidak Langsung	9.871.488.697	9.107.914.972	92,26
Belanja Langsung	11.142.350.434	10.446.908.484	93,76
Jumlah	25.165.789.631	23.185.597.456	92,13

Tabel 16 Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Cianjur tahun 2020

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sasaran tercantum pada **Tabel 17**.

Tabel 17 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
					Realisasi
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	3.590.769.041	3.557.186.445	99,06
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten	1.072.154.000	1.037.383.750	96,76
		Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan	1.249.060.000	1.246.418.000	99,79

Pada Sasaran 1 : Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,06% dengan tingkat efisiensi 0,94%.

Pada Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur tingkat penyerapan sebesar 96,76% dengan tingkat efisiensi 3,24 %,sedangkan Indikator Perwujudan Transportasi Yang Aman,Nyaman dan Berkeselamatan tingkat penyerapannya 100% dengan tingkat efisiensi 0% sesuai pada **Tabel 18**.

Tabel 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator >100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	99,06	0,94
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur	-	96,76	3,24
		Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan	-	100	0

Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran tahun 2020

Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2020 yaitu:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya Sarana, Prasarana Perhubungan	Persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	98,67%	99,06
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat	Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten	77,14%	96,76
		Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan	100%	99,79

Tabel 19 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2020

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan yang mendukung sasaran strategis selengkapya tercantum dalam tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	JUMLAH / BIAYA (Rp)
BELANJA LANGSUNG		5.911.983.041
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.249.060.000
1.1	Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	197.277.000
1.2	Pengelolaan Angkutan	137.757.000
1.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran	136.226.000
1.4	Aksi Keselamatan Lalu Lintas	40.000.000
1.5	Pengendalian Operasional	737.800.000
2	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.072.154.000
2.1	Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaaraan Bermotor	1.072.154.000
3	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.590.769.041
3.1	Pembangunan Terminal Tipe C	40.000.000
3.2	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	325.000.000
3.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	125.000.000
3.4	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.079.695.000
3.5	Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	1.003.473.000
3.6	Pembangunan Terminal Tipe C (L)	17.601.041

Tabel.20 Rincian program dan kegiatan Urusan Wajib

Capaian realisasi anggaran untuk belanja urusan Perhubungan yang mendukung capaian strategis 1 adalah Rp 3.557.186.445 dari target anggaran Rp 3.590.769.041 atau capaian sebesar 99,06 artinya capaian kinerja anggaran belanja untuk mendukung sasaran strategis Meningkatkan Sarana,Prasarana Perhubungan dalam kategori **SANGAT TINGGI**.

Realisasi kinerja anggaran yang mendukung sasaran strategi Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 21 Realisasi Kinerja Anggaran yang mendukung sasaran strategi Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur /Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana,Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		3.590.769.041	3.557.186.445	99.06
1.1	Pembangunan Terminal Tipe C	Input :			
		Dana	40.000.000	39.512.000	98.78
		Output :			
		- Dokumen perencanaan	1	1	100
		Outcome :			
		- Menunjang Persentase sarana dan prasarana perhubungan	80	75	93,75
1.2	Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Input :			
		Dana	325.000.000	322.958.645	99.37
		Output :			
		- Jumlah Rambu yang tersedia	90	80	89
		- Jumlah kerucut yang tersedia	50	170	340
		-			
		Outcome :			
		Menunjang persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	84,14	86,96	103,35
1.3	Rehabilitas/Pemeliharaan Fasilitas	Input :			
		Dana	125.000.000	123.764.407	99.01
		Output :			

	Perlengkapan Jalan	- Jumlah Traffictlight yang terpelihara	1	1	100
		- Jumlah Warning Light yang terpelihara	0	0	0
		- Jumlah Marka yang terpelihara	0	0	0
		Outcome :			
		- Menunjang persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	84,14	86,96	103,35
1.4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Input :			
		Dana	1.003.473.000	1.003.200.000	99,97
		Output :			
		- Jumlah Terminal yang tersedia	2	2	100
		Outcome :			
		Menunjang persentase penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	80	75	93,75
		-			
1.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Input :			
		Dana	2.079.695.000	2.050.150.352	98,58
		Output :			
		- Jumlah lampu PJU yg terpasang	500	457	100
		- Jumlah stang PJU yang tersedia	1	1	100
		- Jumlah komponen material PJU	20	20	100
		Outcome :			
		- Menunjang Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	84,14	86,96	103,35
1.6	Pembangunan Terminal Tipe C (L)	Input :			
		Dana	17.601.041	17.601.041	100
		Output :			

		- Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun	1	1	100
		Outcome :			
		- Menunjang persentase sarana dan prasarana perhubungan	26,66	26,66	100

Capaian realisasi anggaran untuk belanja urusan Perhubungan yang mendukung capaian strategis 2 adalah Rp 1.246.418.000 dari target anggaran Rp 1.249.060.00 atau capaian sebesar 99,79% artinya capaian kinerja anggaran belanja untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat dalam kategori **SANGAT TINGGI**.

Realisasi kinerja anggaran yang mendukung sasaran strategi Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat disajikan pada table berikut :

Tabel 22

Realisasi Kinerja Anggaran yang mendukung sasaran strategi Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat.

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur /Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas		1.249.060.000	1.246.418.000	99.79
1.1	Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Input :			
		Dana	197.277.000	194.875.000	98.78
		Output :			
		- Jumlah rekayasa lalin yg dilaksanakan	3	3	100
		Outcome :			
		- Menunjang perwujudan transportasi aman,nyaman dan berkeselamatan	100	100	100
1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran	Input :			
		Dana	136.226.000	136.206.000	99.99
		Output :			
		- Jumlah petugas parkir yang bertugas	320	320	100
		- Jumlah pegawai yang diberi honor	12	12	100

		Outcome :			
		- Menunjang perwujudan transportasi aman,nyaman dan berkeselamatan	100	100	100
1.3	Pengelolaan Angkutan	Input :			
		Dana	137.757.000	137.757.000	100
		Output :			
		- Jumlah kendaraan yang terinventarisasi	2000	2000	100
		- Jenis barang cetakan penunjang pengelolaan angkutan	4	4	100
		Outcome :			
		- Menunjang perwujudan transportasi aman,nyaman dan berkeselamatan	100	100	100
1.4	Aksi Keselamatan Lalu Lintas	Input :			
		Dana	40.000.000	40.000.000	100
		Output :			
		- Jumlah aksi keselamatan	1	1	100
		Outcome :			
		- Menunjang perwujudan transportasi aman,nyaman dan berkeselamatan	100	100	100
1.5	Pengendalian Operasional	Input :			
		Dana	737.800.000	737.580.000	99.97
		Output :			
		- Jumlah titik Pengendalian	30	30	100
		Outcome :			
		- Menunjang Transportasi aman, nyaman, dan berkelanjutan	100	100	100
2	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		1.072.154.000	1.037.383.750	96.76
2.1	Pengelolaan Pengujian dan	Input :			
		Dana	1.072.154.000	1.037.383.750	96.76

Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Output :			
	- Jumlah alat uji yg terpelihara	1	1	100
	- Jumlah Smartcard yang tersedia	28.600	28.600	100
	- Cetakan penunjang PKB yang tersedia	6	6	100
	Outcome :			
- Menunjang Persentase kendaraan umum barang laik jalan di kabupaten Cianjur	100	77,14	77,14	

Sumber : Dinas Perhubungan

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Hasil : Terlaksananya pengujian kendaraan wajib uji sebanyak 16.262 kendaraan dari target yang direncanakan sebanyak 21.081 kendaraan pada tahun 2020 atau sebesar 77,14%
- Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Hasil : Terlaksananya rekayasa lalu lintas pada Hari Raya Lebaran , Natal dan Tahun Baru
- Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran
Hasil : Terkelola tempat parkir dengan baik untuk meningkatkan pad retribusi parkir.
- Kegiatan Pemeliharaan Shelter
Hasil : Terpeliharanya shelter / halte sebanyak 5 shelter di Jl.Perintis Kemerdekaan, Jl.Pangeran Hidayatullah, Jl.KH.Ir.H.Juanda, Jl.KH. Abdullah Bin Nuh dan Jl.Arif Rahman Hakim
- Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Hasil : Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan
- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Umum
Hasil : Terpasangnya pju dan terpeliharanya pju yang rusak/padam
- Kegiatan Pengelolaan Angkutan
Hasil : Terinventarisasinya angkutan umum sebanyak 2000 kendaraan
- Kegiatan Aksi Keselamatan Lalu Lintas
Hasil : Terlaksananya kegiatan aksi keselamatan lalu lintas sebanyak 1 kali

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kurangnya penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang cukup.
- Fasilitas terminal yang sangat minim dan dibawah standar pelayanan minimum
- Minimnya pembinaan tentang keselamatan,tatacara berlalu lintas yang baik dan benar bagi para pengguna angkutan umum
- Pembatasan jumlah jam operasional karena adanya Pandemi Covid-19 Sehingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) Parsial sesuai dengan PERBUP Kab. Cianjur No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Parsial dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19)
- Belum adanya pengujian kendaraan keliling

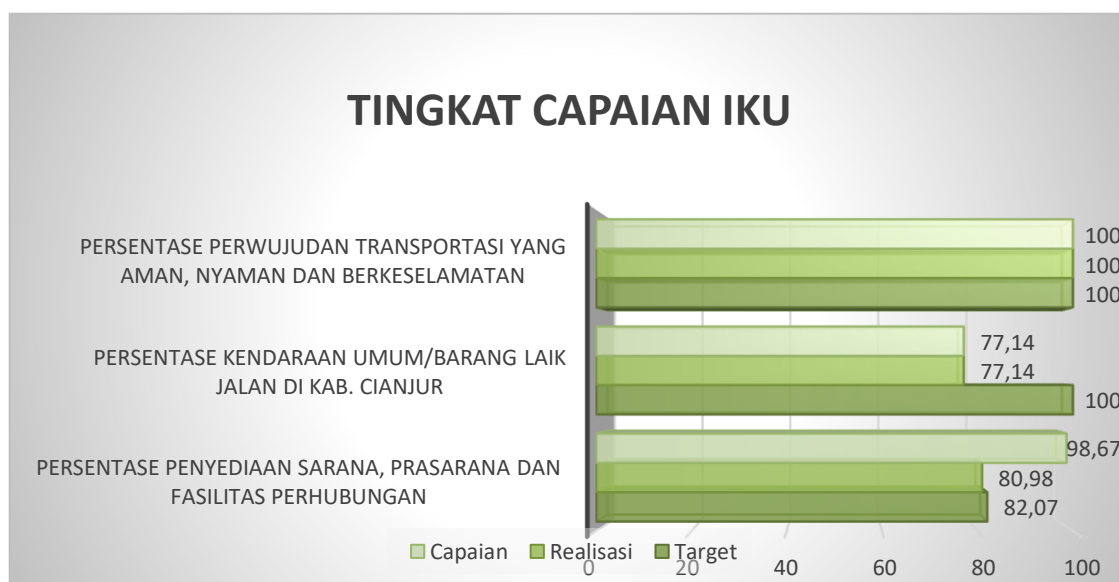
Solusi :

- Penyerapan lulusan STTD
- Mengikuti Diklat Teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
- Menganggarkan Kembali anggaran fasilitas terminal dan pembangunan terminal
- Melakukan sosialisasi kepada para pengguna angkutan jalan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari gambar dibawah dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU Dinas Perhubungan masuk kedalam kategori **SANGAT TINGGI** di 2 Indikator dan 1 indikator lainnya masuk kedalam kategori **TINGGI**. Berdasarkan ketercapaian IKU terdapat 2 indikator belum tercapai atau sebesar 66,67 %, 1 indikator tercapai atau sebesar 33,33 %. Untuk Tingkat pencapaian dan ketercapaian IKU Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 6** dan **Gambar 7**.



Gambar 6 Tingkat Pencapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2020



Gambar 7 Ketercapaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2020

2. Hambatan dan Upaya

Hambatan yang terdapat di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang transportasi seperti ; Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andallalin, Parkir dan Pengawas Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Manajemen Terminal ;
- b. Masih belum tercapainya target pembangunan Terminal Tipe C dan Terminal Pangkalan ;
- c. Fasilitas terminal yg sangat minim dan dibawah standar pelayanan minimum ;
- d. Minimnya pembinaan tentang keselamatan, tata cara berlalu lintas yg baik dan benar ini dalam berkendara bagi para supir angkutan umum ;
- e. Masih rendahnya kesadaran pihak operator penyedia jasa angkutan dalam upaya optimalisasi Terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur ;

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada saat ini mulai bertambahnya penawaran - penawaran bimbingan teknis dan diklat baik di bidang perhubungan baik dari Kementrian Perhubungan maupun dari lembaga teknis lainnya ;
- b. Setiap tahunnya dilakukan pengajuan anggaran untuk pembangunan Terminal Tipe C dan Terminal Pangkalan, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi ;
- c. Mengajukan anggaran untuk Fasilitas Terminal tahun berikutnya;
- d. Melakukan Sosialisasi kepada para supir angkutan umum ;
- e. Rendahnya kesadaran penyedia jasa angkutan dalam memanfaatkan fungsi dari terminal sangat sulit diselesaikan, yang tentunya berdampak kepada tidak optimalnya Fungsi Terminal dan sulit tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Keterminalan. Akan tetapi para kepala UPTD Terminal beserta anggotanya selalu tidak bosan untuk memberikan himbauan dan arahan kepada penyedia jasa angkutan agar dapat membantu optimalnya terminal dan tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2020 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2020 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.